



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026





RENCANA KERJA TAHUN 2026



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (Renja) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu untuk periode satu tahun.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, September 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



Drs. LEO PUTRA, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN
2024 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian
Renstra 10

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 37

3.3. Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM 46

BAB V PENUTUP 57

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 57

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 57

5.3. Rencana Tindak Lanjut 58

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024	11
II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024	18
II.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam	19
II.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan pada Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024	23
II.5. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Visi dan Misi Walikota dengan Penyelesaian Dampak	29
II.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam	32
II.7. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam ..	35
III.1. Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026	38
III.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam	42
IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam	47

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.2. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ..	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi

pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

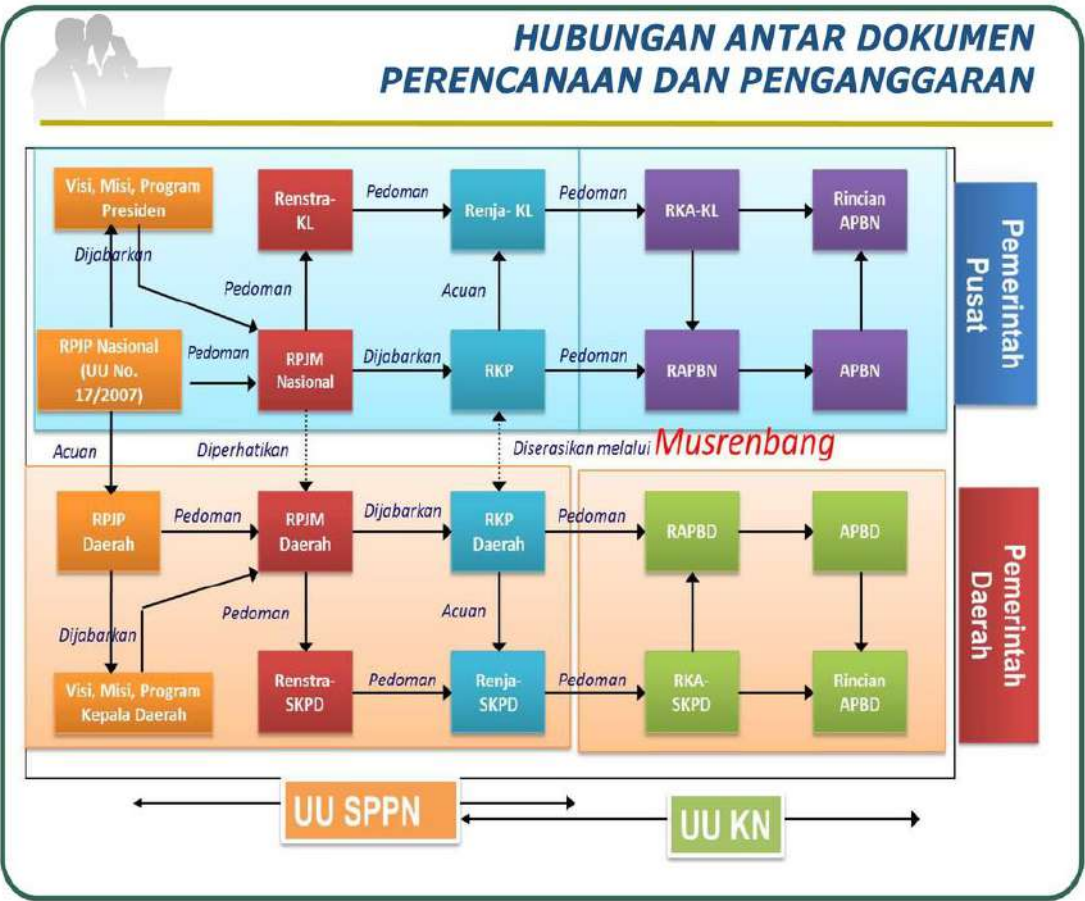


Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga=KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.2. LANDASAN HUKUM

- Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :
- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

- 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 - 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- 44) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;
- 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai

implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

- 1. sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026
- 2. sebagai pedoman monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan
- 3. sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1.Latar Belakang
	1.2.Landasan Hukum
	1.3.Maksud dan Tujuan
	1.4.Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tema, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2025
	3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.4. Program dan Kegiatan.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

Jumlah pagu anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.90.376.458.117,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.82.041.495.496,00 atau sebesar 90,78%.

Dalam penganggaran tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Perhubungan melaksanakan 3 Program dan 14 kegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Rencana dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2024

Tabel T.C-29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	RENCANA STRATEGIS 2021-2026		RENCANA STRATEGIS 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/7)	11	12=(7+9+11)	13=(12/6)
2.15.	URUSAN PERHUBUNGAN											
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Nilai perolehan LHE Inspektorat terhadap LAKIP Dinas Perhubungan	74	100%	100%	91%	91%	100%	100%	100%
				Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan Internal Dishub	90%							
				Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan								
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0%	-	-	0%	100%	100%	100%
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	RENCANA STRATEGIS 2021-2026		RENCANA STRATEGIS 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/7)	11	12=(7+9+11)	13=(12/6)
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	Persentase Pelayanan BLUD	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	90%	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	34%	56%	81%	60%	87%	90%	60%	87%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4.710 Unit			2.924 Unit	4.199 Unit	3.110 Unit	66%	4.710 Unit	3.110 Unit	88%
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	-	100%	100%	100%	0%	-	0%
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	100%	Persentase terlaksananya pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	100%	56%	85%	56%	66%	92%	56%	56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	RENCANA STRATEGIS 2021-2026		RENCANA STRATEGIS 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/7)	11	12=(7+9+11)	13=(12/6)
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	400 Orang Jukir	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5%	0	200 Orang Jukir	100 Orang Jukir	50%	300 Orang Jukir	300 Orang Jukir	25%
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	100%	Jumlah Penambahan Satuan Ruang parkir (SRP) Baru	25 Lokasi	70%	91%	74%	81%	96%	96%	96%
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	80%	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	53%	53%	78%	49%	56%	80%	60%	75%
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	73%	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	100%	64%	67%	67%	100%	70%	67%	92%
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	63%	Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	12%	23%	41%	24%	59%	50%	25%	40%
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	42%	80%	100%	90%	90%	100%	90%	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	RENCANA STRATEGIS 2021-2026		RENCANA STRATEGIS 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/7)	11	12=(7+9+11)	13=(12/6)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik	73%	43%	49%	58%	118%	49%	49%	100%
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	8 Unit	67%	100%	113%	113%	100%	67%	67%
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	7 Unit	97%	94%	100%	106%	106%	106%	106%

Berdasarkan tabel II.1 evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2024, program dan kegiatan yang disajikan tidak semuanya mencapai 100%. Hal ini mengingat beberapa pekerjaan tidak dapat dianggarkan sesuai target yang sudah ditetapkan, sebagaimana dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Program *jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun* pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 501 unit hanya dapat dianggarkan sebanyak 186 unit yang terdiri dari pembangunan 182 unit rambu-rambu keselamatan lalu lintas, pembangunan 2 unit halte, dan pembangunan 1 unit *traffic light* atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta 1 unit *traffic light* serta 1 unit *pelican crossing*., sehingga realisasi sampai dengan tahun 2024 hanya terealisasi bisa mencapai 60%.



2. Indikator Kinerja Program *Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji* sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar 49% atau 56% dari yang ditargetkan sebesar 78%.



3. Indikator Kinerja Program *Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam* sampai dengan Desember 2024 mencapai 59% berdampak dari jumlah penumpang Trans Batam yang belum maksimal akibat dari kesadaran masyarakat untuk naik transportasi umum belum

sepenuhnya dan banyak penumpang beralih ke angkutan umum lain seperti angkutan *online*.



4. Indikator Kinerja Program *Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut* mencapai 118% dari target 49%, jumlah mobilitas masyarakat diwilayah hinterland yang memanfaatkan kapal dari Dinas Perhubungan cukup tinggi mengingat kapal yang beroperasi diwilayah hinterland hanya 3 (tiga) kali seminggu, hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pemangku jabatan.





2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

TABEL II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2024

Tabel T.C-30

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan			75%	84%	89%	95%	100%	53%	56%	60%	66%	75%	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota			41%	44%	44%	45%	48%	47%	44%	44%	45%	45%	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland			88%	91%	94%	97%	100%	84%	97%	106%	106%	106%	

TABEL II.3
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TINGKAT CAPAIAN
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	89%	60%	67%
	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	44%	45%	102%
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	94%	106%	113%

Berdasarkan tabel II.3 terkait pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam yang merupakan menjadi Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Indikator Kinerja Sasaran *Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan* yang tingkat capaian indikatornya hanya mencapai 67% dapat jelaskan dari target 89% terhadap pembangunan sarana dan prasarana perhubungan atau sejumlah 501 unit yang harus dibangun pada tahun 2024 namun hanya dapat dianggarkan sebanyak 186 unit yang terdiri dari pembangunan pembangunan 182 unit rambu-rambu keselamatan lalu lintas, pembangunan 2 unit halte, dan pembangunan 1 unit *traffic light* atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta 1 unit *pelican crossing*, sehingga pada tahun 2024 hanya bisa terealisasi sebesar 60%.
2. Indikator Kinerja Sasaran *Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota* dengan tingkat indikator mencapai 100% hal ini sejalan dengan jumlah bus Trans Batam yang sebanyak 48 bus, namun hal ini tidak menjadi jaminan seluruh penumpang dapat dilayani dengan Bus Trans Batam, karena dengan jumlah Bus yang beroperasi sebanyak 48 unit dianggap masih belum ideal, walaupun mulai 1 Januari 2024 bekerjasama dengan PT. Bagong Dekaka Makmur menghadirkan 20 unit Bus Trans Batam melalui skema *Buy The Service* (BTS), namun hal ini tentunya masih belum dapat membuat para penumpang Trans Batam

beralih ke angkutan umum lainnya terutama angkutan online yang saat ini sedang marak-maraknya.

3. Indikator Kinerja Sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland* dengan tingkat capaian indikator sebesar 106% diperoleh dari jumlah presentasi dermaga yang terbangun dibandingkan dengan target jumlah dermaga yang harus dibangun, hal ini dapat dijelaskan bahwa pencapaian lebih dari indikator ini karena adanya hibah kapal dari Kementerian Sosial pada bulan November 2023 berupa 3 unit kapal penumpang berkapasitas 20 orang dengan maksimal daya angkut 40 orang per kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut anak sekolah di wilayah hinterland, sampai dengan tahun 2024 jumlah dermaga yang ditargetkan untuk dibangun adalah sebanyak 1 unit dermaga namun pada 2024 Dinas Perhubungan dapat menganggarkan 3 unit dermaga. Realisasi indikator sampai dengan tahun 2024 mencapai 106%, hal ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94%, sehingga tingkat capaian target mencapai 113%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 24 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan jalan, prasarana perhubungan, dan angkutan laut
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lalu lintas, angkutan jalan, prasarana perhubungan, dan angkutan laut.

- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, prasarana perhubungan, dan angkutan laut.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2024, terdapat beberapa isu-isu penting antara lain adalah :

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Mematuhi Peraturan Lalu Lintas
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam sangat pesat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih rendah, ditunjukkan dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, dan berkendara di bawah umur. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu ditangani dengan penguatan edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mewujudkan budaya tertib lalu lintas di masyarakat.
2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas
Sebagai kota industri, perdagangan, dan pariwisata, Batam memiliki mobilitas tinggi yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas perhubungan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, terminal, dan halte, masih belum sepenuhnya memadai dan terpelihara. Hal ini menimbulkan kerawanan kecelakaan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Untuk itu, isu strategis yang perlu dijawab adalah modernisasi, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung keselamatan lalu lintas.
3. Belum Optimalnya Pengujian terhadap Kendaraan Wajib Uji
Uji berkala kendaraan bermotor (KIR) merupakan instrumen penting untuk menjamin kelayakan kendaraan di jalan. Namun, tingkat kepatuhan pemilik kendaraan di Batam terhadap kewajiban uji KIR masih rendah. Banyak kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum beroperasi tanpa uji berkala,

sehingga meningkatkan risiko kecelakaan akibat kondisi teknis kendaraan yang tidak laik jalan. Di Batam, isu ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya volume kendaraan angkutan logistik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas layanan uji berkala, digitalisasi sistem KIR, dan peningkatan pengawasan di lapangan menjadi isu strategis utama.

4. Belum Optimalnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Wilayah Hinterland

Kota Batam tidak hanya terdiri dari pulau utama, tetapi juga mencakup wilayah hinterland dengan pulau-pulau kecil disekitarnya. Konektivitas transportasi darat maupun laut ke wilayah hinterland masih terbatas, baik dari sisi frekuensi maupun kualitas layanan. Hal ini menghambat akses masyarakat, distribusi barang, serta potensi pengembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, isu strategis yang perlu ditangani adalah penguatan konektivitas transportasi darat-laut ke wilayah hinterland secara berkelanjutan.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Trans Batam sebagai Transportasi Massal di Kota Batam

Trans Batam telah menjadi tulang punggung transportasi umum massal di Kota Batam. Namun, cakupan rute, integrasi layanan, frekuensi perjalanan, serta kenyamanan armada masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibanding menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu ditangani adalah percepatan pengembangan Trans Batam sebagai transportasi massal yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi.

6. Belum Optimalnya Pelayanan Parkir di Kota Batam

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Batam tidak diimbangi dengan ketersediaan dan tata kelola parkir yang baik. Permasalahan seperti parkir liar, keterbatasan lahan parkir, serta manajemen parkir on-street yang belum tertata menimbulkan kemacetan dan menurunkan ketertiban lalu lintas. Oleh sebab itu, isu strategis yang harus dijawab adalah peningkatan tata kelola dan pelayanan parkir yang tertib, modern, dan berbasis teknologi informasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

TABEL II.4
FAKTOR PENGHAMBAT & FAKTOR PENDORONG PELAYANAN
PADA KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	masih rendahnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor	Komitmen peningkatan kualitas pelayanan OPD
3	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	banyak sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi kurang baik	terbatasnya dana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Komitmen peningkatan kualitas pelayanan OPD dengan perawatan rutin
4	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	Pola pikir masyarakat masih dominan menggunakan kendaraan pribadi	Dukungan Walikota untuk penguatan transportasi publik; tersedianya armada dan rute utama
5	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
6	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Anggaran terbatas untuk ITS (Intelligent Traffic System)	Dukungan visi Walikota mewujudkan sistem transportasi cerdas
7	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih maraknya parkir liar dan kesadaran rendah terhadap keselamatan	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dan Potensi PAD besar dari parkir serta kebijakan digitalisasi parkir
8	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Kapasitas dan jumlah alat uji terbatas; kepatuhan pemilik kendaraan rendah	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang dan peningkatan uji KIR untuk Kebutuhan keselamatan transportasi

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
9	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Dukungan dari kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam operasi keselamatan serta adanya SK Walikota No. KPTS.50/HK/1/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam
10	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Dukungan Pemko dalam subsidi dan pengadaan armada; potensi mengurangi kemacetan
		Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	satu-satu nya bus yang melayani siswa diwilayah hinterland
11	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlalu besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun dan merehab dermaga	Alokasi Anggaran yang terbatas untuk mendukung pembangunan dan rehab	Dukungan misi Walikota percepatan pembangunan hinterland

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera

Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi

yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi 4 : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota di atas, maka disusunlah program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang***

dan misi ke 4 (empat) yaitu ***Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.***

2.3.4. Peluang dan Tantangan Dinas Perhubungan

Peluang Dinas Perhubungan Kota Batam:

1. Untuk mendukung misi ke 2 (dua) mewujudkan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman peluang Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- Pengembangan Transportasi Publik Massal

Adanya dukungan pembangunan halte dan penambahan armada Trans Batam membuka peluang untuk mendorong pergeseran masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

- Penguatan Keselamatan Jalan

Melalui optimalisasi uji KIR, penertiban kendaraan ODOL, serta penataan titik rawan kecelakaan, Dinas Perhubungan

berpeluang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas.

- Integrasi Tata Ruang dan Transportasi

Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang memberi ruang bagi Dinas Perhubungan untuk membangun fasilitas penunjang keselamatan pengguna jalan yang selaras dengan perkembangan wilayah.

- Peluang Peningkatan PAD dari Parkir

Potensi lebih dari 700 titik parkir di Batam dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan daerah dengan sistem yang transparan dan modern.

2. Untuk mendukung Misi ke 4 (empat) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, Dinas Perhubungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di wilayah hinterland dengan peluang sebagai berikut:

- Pengembangan Sarana Transportasi Laut

Hinterland Batam yang berupa pulau-pulau kecil membutuhkan peningkatan dermaga, kapal penyeberangan, dan jalur pelayaran untuk memperlancar mobilitas orang dan barang.

- Peningkatan Konektivitas Darat–Laut

Integrasi antara transportasi darat di Batam daratan dengan transportasi laut menuju hinterland menjadi peluang untuk mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan mobilitas masyarakat hinterland untuk aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, dan perdagangan antar pulau.

- Pemerataan Layanan Publik

Transportasi yang memadai akan memastikan akses masyarakat hinterland terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya dapat setara dengan wilayah utama Batam.

- Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat

Dukungan regulasi, anggaran, dan investasi dari pusat menjadi peluang bagi Dinas Perhubungan untuk mempercepat pembangunan transportasi di wilayah hinterland secara terpadu.

Tantangan Dinas Perhubungan Kota Batam:

1. Kapasitas SDM Teknis yang Terbatas

Masih terbatasnya jumlah aparatur dengan kompetensi teknis di bidang perhubungan menjadi tantangan yang berkelanjutan. Penguasaan teknologi transportasi cerdas (smart transportation), manajemen lalu lintas, serta sistem digital perparkiran memerlukan peningkatan kapasitas SDM agar sejalan dengan arah pembangunan kota berbasis digitalisasi layanan.

2. Keselamatan Angkutan Barang dan Orang

Kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan angkutan barang dan angkutan orang, masih menjadi isu krusial. Tantangan ini erat kaitannya dengan kendaraan yang tidak laik jalan, pengawasan uji KIR yang belum optimal, serta masih maraknya praktik Over Dimension Over Loading (ODOL).

3. Optimalisasi Layanan Trans Batam

Meskipun pada 2025 telah dilakukan penambahan armada dan pembangunan halte, pada 2026 tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan jumlah penumpang secara signifikan. Hal ini membutuhkan penataan rute yang lebih adaptif dengan pola pergerakan masyarakat, peningkatan frekuensi layanan, serta peningkatan kenyamanan dan keamanan agar Trans Batam lebih kompetitif dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.

4. Retribusi Parkir yang Belum Optimal

Potensi penerimaan daerah dari sektor parkir diperkirakan masih belum sepenuhnya tergali pada 2026. Implementasi sistem baru manajemen parkir memerlukan pengawasan ketat, integrasi digital, serta penertiban terhadap jukir liar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir akan menjadi tantangan utama agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga

Mengingat Kota Batam memiliki karakteristik khusus dengan keberadaan BP Batam sebagai mitra strategis, tantangan tahun 2026 juga terletak pada sinkronisasi kebijakan antara Pemko Batam, BP Batam, dan instansi vertikal terkait. Harmonisasi kebijakan sangat diperlukan agar pembangunan transportasi berjalan terpadu, baik dari sisi darat, laut, maupun penataan tata ruang transportasi kota.

2.3.5. Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Dinas Perhubungan

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Teknis

- Masih terbatasnya aparatur yang menguasai bidang teknis perhubungan berdampak pada kualitas perencanaan, pengawasan, dan implementasi program transportasi.
- Tantangan dalam penguasaan teknologi transportasi cerdas (smart transportation), digitalisasi layanan, serta manajemen lalu lintas modern.

2. Keselamatan Transportasi dan Lalu Lintas

- Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan angkutan orang dan barang.
- Banyak kendaraan angkutan yang tidak laik jalan karena KIR kedaluwarsa atau praktek ODOL (Over Dimension Over Loading).
- Belum optimalnya penataan titik rawan kecelakaan dan perlengkapan keselamatan lalu lintas (rambu, marka, jalur darurat).

3. Optimalisasi Layanan Transportasi Publik (Trans Batam)

- Jumlah penumpang Trans Batam masih terbatas meskipun sudah ada penambahan armada dan pembangunan halte.
- Tantangan dalam meningkatkan frekuensi, kenyamanan, keamanan, serta integrasi moda transportasi untuk menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

4. Pengelolaan Retribusi Parkir dan PAD

- Retribusi parkir belum meningkat signifikan meskipun potensi mencapai ratusan titik.
- Tata kelola parkir masih menghadapi masalah transparansi, praktik maladministrasi, serta pengawasan terhadap jukir liar.
- Perlu penerapan sistem parkir modern berbasis digital dan profesional untuk meningkatkan PAD.

5. Pengembangan Transportasi Hinterland

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi laut (dermaga, armada penyeberangan) di wilayah hinterland.
- Keterbatasan aksesibilitas masyarakat pulau-pulau kecil terhadap pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- Perlu integrasi antara transportasi darat-laut agar hinterland mampu menopang perekonomian Batam secara menyeluruh.

6. Sinkronisasi Kebijakan Transportasi dengan Tata Ruang dan Lembaga Lain
- Pentingnya sinergi antara Pemko Batam, Badan Pengusahaan Batam, dan instansi vertikal dalam pembangunan transportasi.
 - Perlu harmonisasi kebijakan agar pembangunan infrastruktur transportasi sesuai dengan tata ruang kota serta mendukung visi pembangunan berkelanjutan.

Dampak dan faktor penghambat dan pendorong terhadap visi misi Walikota yang terkait dengan capaian program dan formulasi penyelesaian dampak, yaitu ;

TABEL II.5
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG TERHADAP VISI MISI WALIKOTA DENGAN PENYELESAIAN DAMPAK TAHUN 2024

ASPEK	URAIAN
Dampak Terhadap Visi-Misi Walikota	1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas menghambat misi kota aman dan nyaman.
	2. Rendahnya jumlah pengguna Trans Batam berdampak pada pencapaian kota ramah lingkungan (misi 2).
	3. PAD dari Retribusi Parkir tidak optimal, mengurangi kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi.
	4. Keterbatasan sarana-prasarana transportasi hinterland menurunkan pemerataan pembangunan (misi 4).
	5. Ketidaksinergian program perhubungan dan tata ruang dapat menghambat pembangunan kota berkelanjutan.
Faktor Penghambat	1. SDM terbatas dalam penguasaan teknis transportasi modern.
	2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan operasional transportasi publik.
	3. Kultur masyarakat masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi.
	4. Pengawasan lemah pada uji KIR, retribusi parkir, dan penegakan aturan ODOL.
	5. Dualisme kewenangan Pemko Batam – BP Batam yang memengaruhi konsistensi kebijakan transportasi.
Faktor Pendorong	1. Dukungan visi-misi Walikota yang menekankan pembangunan transportasi maju, aman, ramah, dan terintegrasi.
	2. Posisi Batam sebagai kota strategis di jalur perdagangan internasional (peluang pengembangan transportasi laut dan logistik).
	3. Teknologi digital (smart transportation, e-ticketing, e-parking) sebagai inovasi peningkatan layanan.
	4. Kebijakan nasional tentang pembangunan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi kendaraan.
	5. Partisipasi swasta/investor dalam penyediaan infrastruktur transportasi.

ASPEK	URAIAN
Formulasi Penyelesaian Dampak	1. Peningkatan Kapasitas SDM → pelatihan teknis, sertifikasi, rekrutmen tenaga ahli transportasi.
	2. Penguatan Keselamatan → revitalisasi uji KIR, razia ODOL, pemasangan perlengkapan keselamatan lalu lintas, serta kampanye edukasi.
	3. Optimalisasi Trans Batam → penambahan armada, perbaikan rute, integrasi dengan moda lain, sistem tiket digital, dan peningkatan kenyamanan.
	4. Digitalisasi Retribusi Parkir → penerapan sistem parkir elektronik, penataan titik parkir resmi, pengawasan berbasis aplikasi untuk meminimalisasi kebocoran PAD.
	5. Pengembangan Transportasi Hinterland → pembangunan dermaga terpadu, peningkatan armada penyeberangan, dan integrasi transportasi darat-laut.
	6. Harmonisasi Kebijakan → forum koordinasi Pemko, BP Batam, dan instansi vertikal untuk menyelaraskan transportasi dengan tata ruang kota.
	7. Kemitraan & Investasi Swasta → mendorong investasi sektor transportasi publik, parkir modern, dan logistik melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam telah ditetapkan Pagu Anggaran Rp.92.453.412.957,00 berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota Batam.

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp.133.460.409.681,- atau meningkat sebesar 42%. Pagu pada rancangan awal RKPD merupakan pagu yang berasal dari Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Batam pada periode sebelumnya yaitu tahun 2021-2026, sehubungan dengan sedang berjalannya penyusunan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan kebutuhan yang ada maka pagu yang dibutuhkan menjadi meningkat.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan belanja pegawai pada kegiatan Administrasi Keuangan yang berasal dari gaji karena adanya perpindahan THL ke PPPK sebanyak 136 orang sehingga penambahan pagunya hampir 100%.
2. Adanya penambahan pembangunan pedestrian pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan usulan pokok pikiran (pokir).

3. Pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dibutuhkan peremajaan Bus Trans Batam serta untuk mencapai target penyediaan 10 Koridor yang mana mulai tahun 2024 UPT Trans Batam sudah melaksanakan sistem BTS (*Buy The Service*) dengan pihak ke tiga dan di tahun 2026 adanya penambahan sebanyak 23 unit. Hal ini tentunya untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman di Kota Batam

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel II.5 berikut ini :

TABEL II.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-31

NOMOR REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS PERHUBUNGAN					41.821.231.725,00					52.796.619.463,00
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	19.872.089.969,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai perolehan LHE Inspektorat terhadap LAKIP Dinas Perhubungan	74	33.657.038.563,00
								Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan Internal Dishub	90%	
2.15.01.2.01	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0%	-	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	100%	18.967.500,00
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100%	14.685.442.969,00	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100%	30.203.174.238,00
2.15.01.2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	298.508.000,00	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	142.484.700,00
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	478.916.000,00	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	270.439.200,00
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	265.620.000,00	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	130.004.600,00
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.930.550.000,00	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.349.334.425,00
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	1.213.053.000,00	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	1.542.633.900,00

NOMOR REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100%	13.946.233.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	34%	12.125.910.100,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	5.211 Unit						
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	5.948.641.800,00	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	6.139.585.800,00
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	100%	6.887.319.200,00	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase terlaksananya pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1	100%	4.939.172.500,00
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	80%				Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	53%	
2.15.02.2.04	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	73%	774.272.000,00	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	100%	893.551.800,00
2.15.02.2.06	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	336.000.000,00	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan	100%	153.600.000,00
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	8.002.908.756,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik	73%	7.013.670.800,00
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	8.002.908.756,00	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Kota Batam	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	7 Unit	7.013.670.800,00

NOMOR REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UPTD PELAYANAN TRANSPORTASI					32.632.181.232,00					70.497.779.718,00
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	14.416.175.000,00	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD	100%	15.328.666.200,00
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	12%	
2.15.02.2.07	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	16.493.425.000,00	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	42%	50.512.076.110,00
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	3%	
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	1.722.581.232,00	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	8 Unit	4.657.037.408,00
UPTD PELAYANAN PARKIR					18.000.000.000,00					10.166.010.500,00
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	0,63		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5%	
2.15.02.2.03	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	100%	18.000.000.000,00	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Jumlah Penambahan Satuan Ruang parkir (SRP) Baru	25 Lokasi	10.166.010.500,00
					92.453.412.957,00					133.460.409.681,00

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampung dalam kegiatan berasal dari musyawarah pembangunan daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.6, yaitu :

TABEL II.7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-32

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan		
1	Pembangunan Dermaga	Pulau Kubung RT. 01 / RW. 03 Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa		P = 85 m L = 2,40 m	Usulan Masyarakat pada Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan
2	Pembangunan Dermaga	Pulau Todak RT. 02 / RW. 03 Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa		P = 70 m L = 2 m	
3	Pembangunan Dermaga	Pulau Gara RT. 22 / RW. 06 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang		P = 200 m L = 2 m	
4	Pembangunan Dermaga	Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang		1 Paket	
5	Pembangunan Dermaga	Kampung Batu Putih RT 003 / RW 004 Kelurahan Karas Kecamatan Galang		2 Paket	
6	Pembangunan Dermaga	Tanjung Kalok RT. 003 / RW. 002 Kelurahan Subang Mas		P = 250 m L = 3 m	
7	Pembangunan Dermaga	Pulau Jemara RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang		P = 250 m L = 3 m	
8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Ponton	Pecong RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang		-	
9	Rehab Atap T Dermaga	Kampung Tengah RT. 003 / RW. 001 Kel. Pemping Kecamatan Belakang Padang		P = 11,6 m L = 7 m	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Dermaga/Ponton	RT. 001 / RW. 001 Geranting Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang		1 Unit	
11	Rehab Pelabuhan Umum Petong barat	Pulau Petong RT. 001 / RW. 003 Kel. Pulau Abang Kecamatan Galang		P = 135 m L = 2 m	
12	Pengadaan Boat Transportasi Anak Sekolah dan Masyarakat Pulau Panjang	Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang		1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi INDONESIA EMAS 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Sasaran Utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah:

1. *Sasaran Visi 1* Pendapatan per kapita setara Negara Maju;
2. *Sasaran Visi 2* Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. *Sasaran Visi 3* Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat;
4. *Sasaran Visi 4* Daya saing sumber daya manusia meningkat.

Delapan Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berada di masa transisi penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, namun pada Rencana Kerja tahun 2026, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sudah mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

VISI

**“ BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN
SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”**

MISI

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk periode tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan*** dan misi ke 4 (empat) yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance.***

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk tahun 2025-2029 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN TA 2026

MISI WALIKOTA BATAM 2025-2029	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2026
Misi 2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	2.1. Meningkatkan penyediaan layanan dan infrastruktur yang modern dan efisien	2.1.1. Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam		Rasio Konektivitas Kota	0,836
					SASARAN 1: Meningkatnya Konektivitas Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909
					SASARAN 2: Meningkatnya Konektivitas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,333
Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance	4.1. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing	4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah			SASARAN 4: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Kepuasan pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	90,45

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang disusun sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) Wali Kota Batam tahun 2025-2029 direncanakan berjumlah 3 (Tiga) program Perangkat Daerah, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga puluh enam) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 1.3. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.8.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
 - 2.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- 2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2.1.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- 2.1.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.3.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.4.1. Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
 - 2.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 2.5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 2.5.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - 2.5.2. SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- 2.6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :
 - 3.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

TABEL III.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Tabel T.C-33

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERHUBUNGAN					52.796.619.463,00				68.446.475.197,80
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai perolehan LHE Inspektorat terhadap LAKIP Dinas Perhubungan		74	33.657.038.563,00			76	36.934.753.921,80
		Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan Internal Dishub		90%				93%	
1.	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	Kota Batam	100%	18.967.500,00	APBD		100%	20.864.250,00
2.	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	30.203.174.238,00	APBD		100%	33.203.833.661,80
3.	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	142.484.700,00	APBD		100%	97.576.000,00
4.	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	270.439.200,00	APBD		100%	410.374.500,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Kota Batam	100%	130.004.600,00	APBD		100%	1.133.448.800,00
6.	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Kota Batam	100%	1.349.334.425,00	APBD		100%	1.201.022.520,00
7.	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	1.542.633.900,00	APBD		100%	867.634.190,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia		34%	12.125.910.100,00			53%	16.295.783.276,00
6	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Kota Batam	100%	6.139.585.800,00	APBD		0%	10.451.954.166,00
11	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	Kota Batam	100%	4.939.172.500,00	APBD		100%	4.759.275.110

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR		53%				59%	
10	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	Kota Batam	100%	893.551.800,00	APBD		100%	889.154.000,00
12	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan	Kota Batam	100%	153.600.000,00	APBD		100%	195.400.000,00
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik		73%	7.013.670.800,00				15.215.938.000,00
15	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	Kota Batam	7 Unit	7.013.670.800,00			8 Unit	15.215.938.000,00
UPT PELAYANAN TRANS BATAM					70.497.779.718,00				92.462.609.941,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai perolehan LHE Inspektorat terhadap LAKIP Dinas Perhubungan		74	15.328.666.200,00			76	12.911.053.750,00
		Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan Internal Dishub		90%				93%	
8.	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	15.328.666.200,00	BLUD		100%	12.911.053.750,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)		12%	50.512.076.110,00			13%	73.322.744.143,00
13	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	42%	50.512.076.110,00	APBD		44%	73.322.744.143,00
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan		3%	4.657.037.408,00			3%	6.228.812.048,00
14	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	Kota Batam	8 Unit	4.657.037.408,00	APBD		9 Unit	6.228.812.048,00
UPT PELAYANAN PARKIR					10.166.010.500,00				18.000.000.000,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum		10%	10.166.010.500,00			10%	18.000.000.000,00
9	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Kota Batam	25 Lokasi	10.166.010.500,00	APBD		1264 Lokasi	18.000.000.000,00
TOTAL PAGU					133.460.409.681,00				178.909.085.138,80

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut :

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.15	URUSAN PERHUBUNGAN					52.796.619.463	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai perolehan LHE Inspektorat terhadap LAKIP Dinas Perhubungan			74	33.657.038.563	
		Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan Internal Dishub			90%		
	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan			100%	18.967.500	
		<i>SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		<i>11 Dokumen</i>	<i>9.347.000</i>	
		<i>SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>5 Laporan</i>	<i>9.620.500</i>	
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	30.203.174.238	
2.15.01.2.02.0001			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>DISHUB</i>	<i>207 Orang/ Bulan</i>	<i>30.006.594.238</i>	
2.15.01.2.02.0002			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>DISHUB</i>	<i>17 Dokumen</i>	<i>196.580.000</i>	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			100%	142.484.700	
			<i>SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>DISHUB</i>	<i>67 Paket</i>	<i>63.522.700</i>	
2.15.01.2.05.0009			<i>SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>DISHUB</i>	<i>5 Orang</i>	<i>78.962.000</i>	
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	270.439.200	
2.15.01.2.06.0001			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>DISHUB</i>	<i>2 Paket</i>	<i>25.628.000</i>	
2.15.01.2.06.0002			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>DISHUB</i>	<i>4 Paket</i>	<i>91.895.900</i>	
2.15.01.2.06.0004			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>DISHUB</i>	<i>1 Paket</i>	<i>17.500.000</i>	
2.15.01.2.06.0005			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>DISHUB</i>	<i>2 Paket</i>	<i>23.449.300</i>	
2.15.01.2.06.0009			<i>SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>DISHUB</i>	<i>30 Laporan</i>	<i>111.966.000</i>	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100%	130.004.600	
2.15.01.2.07.0005			SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	DISHUB	19 Unit	20.706.000	
2.15.01.2.07.0006			SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	12 Unit	109.298.600	
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	1.349.334.425	
2.15.01.2.08.0002			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISHUB	4 Laporan	1.055.158.200	
2.15.01.2.08.0004			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISHUB	13 Laporan	294.176.225	
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi			100%	1.542.633.900	
2.15.01.2.09.0001			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISHUB	1 Unit	38.880.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.09.0002			SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISHUB	22 Unit	579.110.000	
2.15.01.2.09.0006			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISHUB	105 Unit	122.084.900	
2.15.01.2.09.0009			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISHUB	1 Unit	802.559.000	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			34%	12.125.910.100	
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				100%	6.139.585.800	
2.15.02.2.02.0001			SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan	Kota Batam	6 Unit	1.085.850.000	
2.15.02.2.02.0002			SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Batam	310 Unit	1.708.958.300	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.02.0003			SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Batam	2 Unit	115.810.000	
2.15.02.2.02.0004			SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Batam	7 Unit	3.228.967.500	
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota			100%	4.939.172.500	
2.15.02.2.06.0013			SUB KEGIATAN : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Batam	1 Unit	141.285.300	
2.15.02.2.06.0016			SUB KEGIATAN : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Batam	3 Unit	4.797.887.200	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR			53%		
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB			100%	893.551.800	
2.15.02.2.05.0001			SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	1 Unit	361.215.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.05.0004			SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	5.000 Dokumen	152.036.800	
2.15.02.2.05.0007			SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	4 Unit	380.300.000	
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun			100%	153.600.000	
2.15.02.2.08.0002			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	Kota Batam	32 Laporan	153.600.000	
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik			73%	7.013.670.800	
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan			7 Unit	7.013.670.800	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.03.2.12.0002			SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	1 Unit	4.272.629.000	
2.15.03.2.12.0003			SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	4 Unit	2.741.041.800	
02.15	UPT PELAYANAN TRANS BATAM					70.497.779.718	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai perolehan LHE Inspektorat terhadap LAKIP Dinas Perhubungan			74		
		Hasil Survey Pelayanan Keseekretariatan Internal Dishub			90%		
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan			100%	15.328.666.200	
2.15.01.2.10.0001			SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	1 Unit Kerja	15.328.666.200	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)			12%		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)			42%	50.512.076.110	
2.15.02.2.09.0001			<i>SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Kota Batam	69 Unit	50.512.076.110	
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut			73%		
2.15.03.2.07	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi			8 Unit	4.657.037.408	
2.15.03.2.07.0004			<i>SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Kota Batam	7 Laporan	4.657.037.408	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)			42%	50.512.076.110	
2.15.02.2.09.0001			SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	69 Unit	50.512.076.110	
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut			73%		
2.15.03.2.07	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi			8 Unit	4.657.037.408	
2.15.03.2.07.0004			SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	7 Laporan	4.657.037.408	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.15	UPT PELAYANAN PARKIR					10.166.010.500	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola			25 Lokasi	10.166.010.500	
2.15.02.2.04.0002			SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Batam	12 Laporan	10.166.010.500	
TOTAL PAGU						133.460.409.681	

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Batam. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini sudah mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan Dokumen Anggaran Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangan pelaksanaannya program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2025-2029, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut ;

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mepedomani hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya

- RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Provinsi Kepulauan Riau, RPJPD Kota Batam, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam;
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Batam, APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun bersumber dari APBN.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring.
4. Dalam menjamin konsistensi sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam secara berjenjang, bertanggungjawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD